



# JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2014 Halaman

<http://www.fisipundip.ac.id>

---

## **PENGELOLAAN TAMAN MENTERI SOEPENO DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SEMARANG**

**Reza Ario Priambodo<sup>1</sup>, Dr Kushandayani, MA.<sup>2</sup>, Dra Wiwik Widayati, M.Si.<sup>3</sup>**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl Prof. H. Soedarto, SN H, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

website:<http://www.fisip.undip.ac.id> email:[fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul Pengelolaan Taman Menteri Supeno dalam mendukung kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Semarang .Taman Menteri Soepeno direncanakan tidak hanya sebagai sebuah taman aktif dengan penanaman pohon-pohon besar seperti asam kranji dalam jumlah besar sehingga menjadi taman kota. permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana pengelolaan Taman Menteri Soepeno dalam mendukung kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Semarang ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Taman Menteri Soepeno dalam mendukung kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan dengan menguji berbagai latar sosial dan individu yang menjalaninya. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah *deskriptif analistis*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Taman Menteri Supeno merupakan salah satu taman yang potensial yang dimiliki oleh Kota Semarang. Karena Taman Menteri Soepeno merupakan salah satu taman aktif kota dari sedikit taman aktif yang dimiliki Kota Semarang. Keberadaan Taman Menteri Soepeno/Taman KB ditinjau dari aspek kebijakan Ruang terbuka Hijau, sebenarnya telah memenuhi 3 (tiga) fungsi utama dari 8 (delapan) fungsi ruang terbuka hijau, yaitu fungsi sebagai Taman Lingkungan (Kegiatan Pasif) yang memiliki lahan dengan tumbuhan keras sebagai paru-paru kota dan tanaman-tanaman bunga, fungsi sebagai Taman Bermain/*Publik Space* yang menyediakan area untuk bermain bagi anak-anak, sehingga taman ini di samping sebagai taman lingkungan juga berfungsi sebagai taman bermain, serta fungsi sebagai Tempat Olah Raga

Kata Kunci : *Pengelolaan, kebijakan*

## ***Abstract***

This study entitled Management of Parks Minister Soepeno to made policy Green Open Space in Semarang City. Parks Minister Soepeno planned not only as an active park with planting large trees such as kranji acid in large quantities to become a city park . issues raised are How to Management of Parks Minister Soepeno to made Green Open Space in Semarang City ?

The purpose of this study is to investigate Management of Parks Minister Soepeno to made policy Green Open Space in Semarang City.

This research is qualitative - descriptive . Qualitative research seeking answers to questions by examining various social settings and the individuals who live it . The nature of the research in this paper is a descriptive analytical .

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the Minister Supeno Park is one of the potential park owned by the city of Semarang. Because Parks Minister Soepeno is one of the few active park city park owned by the city of Semarang active . The existence Parks Minister Soepeno / Wildlife KB in terms of both policy and green open spaces , actually has met three (3) main function of 8 (eight) function space, which functions as an Environmental Park (Passive Activity) land with vegetation that has hard as lungs of the city and flower plants , function as Playground/Public Space that provides an area to play for the kids , so this park next to a neighborhood park also serves as a playground , as well as function as a place Sports

Keywords : Management, Policy

---

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berkaitan dengan masalah pembangunan dan lingkungan hidup, maka dalam setiap pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan tata ruang bagi wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang dimaksud adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota. Pengertian tata ruang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktural dan pola ruang. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional, regional maupun lokal, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur konsep penataan ruang bagi setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan fungsi tanah. Pengertian penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada kenyataannya, pembangunan tata ruang Kota Semarang belum mampu memenuhi ketentuan undang-undang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penetapan 30% dari total luasan wilayah sebagai ruang hijau. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 bahwa :

Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
- b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
- c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
- d. mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat;
- e. mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan
- f. mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

RTRW belum dapat berperan efektif sebagai instrumen pengendali pembangunan Kota Semarang, ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan alokasi peruntukan ruang aktivitas. RTRW berikut produk turunannya belum dijadikan referensi utama bagi setiap SKPD, calon investor, dan masyarakat ketika mengusulkan suatu kegiatan meskipun memiliki kekuatan hukum tetap melalui perangkat peraturan daerah. Secara institusional bahkan terdapat indikasi bahwa revisi RTRW dapat dilakukan dengan menghapuskan (*write-off*) pelanggaran tata ruang yang telah terjadi sebelumnya dengan cara mengubah peruntukannya.<sup>1</sup> Hal ini hampir terjadi juga pada ruang terbuka hijau Taman Menteri Supeno yang lebih dikenal dengan Taman KB.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **a. Pengertian Pengelolaan**

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.<sup>2</sup> Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

### **b. Ruang Terbuka Hijau**

ruang terbuka hijau perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

---

1

2

c. **Kebijakan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

Dalam kaitannya dapat dipahami apabila kebijakan seringkali diberikan makna suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

**C. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Definisi operasional ditunjukkan oleh indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur variabel-variabel secara terperinci sebagai berikut:

- a. Pengelolaan merupakan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu yang diukur dari :
  - 1) Rencana kebijakana program
  - 2) Pelaksanaan kebijakan program
  - 3) Pengawasan dan Evaluasi kebijakan program
- b. Ruang terbuka hijau merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka tanpa bangunan yang diukur dari : Lahan Ruang Terbuka Hijau yang direncanakan:
  1. Lahan Ruang terbuka hijau yang sudah disediakan
  2. Lahan Ruang Terbuka Hijau yang sudah dimanfaatkan sesuai fungsi

**D. Desain Penelitian**

**I. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan dengan menguji berbagai latar sosial dan individu yang menjalaninya. Peneliti kualitatif, kemudian, paling tertarik pada bagaimana manusia mengatur dirinya dan latar sosial mereka dan bagaimana mereka memahami lingkungannya melalui simbol-simbol, ritual, struktur sosial, peran sosial, dan sebagainya. Hasilnya, teknik kualitatif memungkinkan peneliti untuk berbagi pemahaman dan persepsi orang lain dan mengeksplor bagaimana manusia menyusun dan memberi makna bagi kehidupan sehari-hari. Peneliti dengan menggunakan teknik kualitatif ingin menguji bagaimana manusia belajar dan memahami tentang dirinya sendiri dan orang lain.

**II. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif* karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan taman Keluarga Berencana. Penelitian deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah sosial, sistem sosial dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan, yaitu mengenai

implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan taman Keluarga Berencana

### III. **Jenis Data**

#### a. Data primer

Adalah data yang diperoleh dari sumbernya berupa catatan tertulis dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dan analisis terhadap hasil wawancara tersebut. Metode kualitatif dengan analisis resepsi menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) secara individu. Metode ini membiarkan subjek penelitian memberikan interpretasinya terhadap suatu hal. Data penelitian akan diperoleh melalui *interview guide*, yaitu daftar pertanyaan yang digunakan sebagai penuntun dalam kegiatan *indepth interview*. Wawancara yang tidak terstruktur tersebut bersifat *open ended*, artinya pertanyaan dapat berkembang dan berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan situasi yang dihadapi dalam mewawancarai informan.

#### b. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden berupa data penunjang yang mempunyai relevansi dengan masalah-masalah yang diteliti misalnya data dari kajian-kajian pustaka, literature dan artikel.

### IV. **Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (data lapangan) dan sumber data sekunder (data kepustakaan)

### V. **Teknik Pengumpulan Data**

#### a. **Wawancara**

Metode kualitatif dengan analisis resepsi menggunakan wawancara mendalam (*indepth/interview*) secara individu. Metode ini membiarkan subjek penelitian memberikan interpretasinya terhadap suatu hal. Data penelitian akan diperoleh melalui *interview guide* yaitu daftar pertanyaan yang digunakan sebagai penuntun dalam kegiatan *indepth interview*. Wawancara yang tidak terstruktur tersebut bersifat *open ended*, artinya pertanyaan dapat berkembang dan berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan situasi yang dihadapi dalam mewawancarai informan, yaitu :

- 1) Pejabat Pemerintah Kota Semarang
- 2) Pakar Tata Kota
- 3) Masyarakat Kota Semarang

#### b. **Studi Dokumentasi**

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden berupa data penunjang yang mempunyai relevansi dengan masalah-masalah yang diteliti, misalnya data dari kajian pustaka, literatur, dan artikel.

### VI. **Analisis Interpretasi Data**

Hasil wawancara akan digambarkan dalam bentuk saran dan kritik. Wawancara diawali dengan pertanyaan. Langkah-langkah analisis resepsi yang digunakan yaitu :

#### a. **Tahap pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan secara tatap muka untuk menggali

informasi dari informan. *Indepth interview* dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada subjek penelitian yang sebelumnya sudah disusun dalam *interview guide*.

b. **Analisis hasil wawancara**

Data hasil wawancara tersebut dibuat transkrip kemudian dibuat kategorisasi berdasarkan tema-tema yang muncul pada pemaknaan (pemikiran dan argumen) yang dilakukan subjek penelitian.

c. **Interpretasi pengalaman dan pemaknaan audiens**

Gagasan, opini yang muncul kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan proses pemaknaan, karakteristik individu, cara pemaknaan. Lalu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks baik itu wacana teks media maupun konteks sosial, kultural dan kondisi psikologis dari khalayak.

## **PEMBAHASAN**

Taman Menteri Supeno merupakan taman aktif yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Taman Menteri Supeno sebagai taman kota sangat penting keberadaannya. Lingkungan sekitar Taman ini dikelilingi oleh aktivitas-aktivitas antara lain adalah aktivitas pendidikan, permukiman dan perkantoran, serta sering digunakan oleh siswa-siswa SMK Pembangunan untuk contoh tugas pengukuran. Taman Menteri Supeno dijadikan sebagai kawasan untuk praktek salah satu pelajaran di SMK yaitu pengukuran, Untuk hubungan aktivitas pendidikan perkantoran pada jam-jam tertentu (misalnya pada jam istirahat dan jam makan siang) taman ini menjadi alternatif untuk bersantai dan melepas lelah. . Seiring dengan keberhasilan taman di dalam menarik orang untuk masuk di dalamnya berkembang pula suatu kegiatan di luar fungsi taman. Warung-warung PKL oleh pemerintah yang dikonsentrasikan di sekitar Taman Menteri Soepeno telah menggeser lahan jalur bagi pejalan kaki.

Menurut Pemerintah Kota Semarang, pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di tengah Kota Semarang baru mencapai 26%, meskipun total RTH sudah lebih dari 30%. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 tahun 2008, minimal ruang terbuka hijau harus mencapai 30% dari luas wilayah dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Pengelolaan kebijakan ruang terbuka hijau Taman Menteri Soepeno, apabila dikaitkan dengan konsep perencanaan ruang terbuka hijau, maka sesuai konsep rencana tata ruang terbuka hijau perkotaan serta mempunyai dua fungsi utama yaitu (intrinsik) dan tambahan (ekstrinsik). Fungsi utama yakni fungsi ekologis, sedangkan untuk tambahan adalah fungsi arsitektural, ekonomi, dan sosial. Dalam wilayah perkotaan, fungsi itu harus dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. RTH berfungsi ekologis adalah untuk menjamin keberlanjutan suatu kawasan kota secara fisik, yang merupakan bentuk rencana berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu kota. Adapun fungsi tambahan adalah dalam rangka mendukung dan menambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota. . Ditinjau dari besaran luas taman ini sekitar 9250m<sup>2</sup> yang berbentuk segitiga dibutuhkan biaya perawatan yang cukup besar setiap bulannya. Hal ini dalam peruntukannya belum dapat terlaksana disebabkan minimnya

anggaran perawatan bagi taman-taman di Kota Semarang secara keseluruhan serta ketersediaan sumber daya manusia yang sangat minim yang menyebabkan tidak seimbangnya antara sumber daya manusia dengan taman-taman yang harus di rawat namun Bagi Pemerintah Kota Semarang akan minimnya anggaran dan sumber daya manusia yang ada tidak menyurutkan kinerja dalam menjaga fungsi taman Menteri Supeno sebagai ruang terbuka hijau yang aktif dan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat rekreatif dan edukatif.

## **PENUTUP**

### **1) Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengelolaan Taman Menteri Soepeno dalam mendukung kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pengelolaan Taman Menteri Soepeno dalam mendukung kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Semarang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031
- b. Pengelolaan kawasan taman Menteri Supeno sebagai bentuk ruang terbuka hijau di Kota Semarang telah dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Taman Menteri Supeno sebagai taman aktif. Taman Menteri Supeno merupakan salah satu taman yang potensial yang dimiliki oleh Kota Semarang. Karena Taman Menteri Soepeno merupakan salah satu taman aktif kota dari sedikit taman aktif yang dimiliki Kota Semarang. Taman Menteri Soepeno merupakan taman yang direncanakan sebagai taman aktif. Sebuah taman dimana warga kota Semarang dapat dengan bebas keluar masuk dan merasakan suasana yang diciptakan oleh segala properties yang direncanakan untuk Taman Menteri Soepeno. Keberadaan Taman Menteri Soepeno/Taman KB ditinjau dari aspek kebijakan Ruang terbuka Hijau, sebenarnya telah memenuhi 3 (tiga) fungsi utama dari 8 (delapan) fungsi ruang terbuka hijau, yaitu fungsi sebagai Taman Lingkungan (Kegiatan Pasif) yang memiliki lahan dengan tumbuhan keras sebagai paru-paru kota dan tanaman-tanaman bunga, fungsi sebagai Taman Bermain/*Publik Space* yang menyediakan area untuk bermain bagi anak-anak, sehingga taman ini di samping sebagai taman lingkungan juga berfungsi sebagai taman bermain, serta fungsi sebagai Tempat Olah Raga.

### **2) Rekomendasi**

Saran dalam penelitian ini harapannya dapat memberikan solusi setiap masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan terhadap ruang terbuka hijau di kawasan taman Keluarga Berencana jalan Menteri Soepeno Kota Semarang, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada warga tentang arti dan manfaat taman kota.

Pemerintah perlu mengoptimalkan fungsi utama taman kota, sehingga mampu membuat warga nyaman dengan membangun fasilitas penunjang taman seperti trotoar dan lampu penerangan serta memudahkan aksesibilitas bagi semua kalangan untuk mendatangi taman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Eko Budhardjo, 1997, *Penataan Ruang Kota*, Alumni, Bandung, hal 6
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Irawan dan M. Suparmoko, 1992, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Jensen, Klaus Bruhn dan Nicholas W. Jankowski [eds]. *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*. London: Routledge, 2002
- Mustopadidaja, 1992, *Studi Kebijakan, Perkembangan dan Penerapan dalam rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, LP-FEUI, Jakarta
- M.Sahid Indraswara, *Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota (Studi Kasus Taman Menteri Supeno/Taman KB Semarang)*, Enclosure Volume 5 No. 1. Maret 2006 Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman
- Prihadi Nugroho dan Agung Sugiri, 2009, *Studi Kebijakan Embangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang*, Riptek, Vol.3, No.2
- Purnomohadi, 2006, *Ruang Terbuka Hijau sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Jakarta, Dirjend Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
- Oberlin Silalahi, 1989, *Beberapa Aspek Kebijakan Negara*, Yogyakarta : Liberty
- Romadhon, 2005, *Perubahan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau (Studi Kasus Kota Palangkaraya)*, Tesis, Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta
- Solichin Abdul Wahab, 1991, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implentasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2000)